



IV. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAHAN RAWA

Anjir (canal) membuka isolasi daerah rawa

Pembukaan lahan rawa mengambil tempat khusus sejak 1969, yaitu awal Pelita I, pemerintah melalui Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) (1969–1984) mulai melaksanakan pembukaan secara besar-besaran lahan pasang surut di Sumatera (Lampung, Sumsel, Riau, dan Jambi) dan Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk perguruan tinggi sekaligus melakukan penelitian dan pengembang sebagai pendukung bagi pengembangan rawa ke depan. Sebelumnya kolonial Belanda telah menjajaki rawa secara terbatas untuk kolonisasi, pembukaan lahan rawa dilakukan pada 1920 secara skala kecil, misalnya daerah Anjir Tamban, Anjir Serapat, dan Kertak Hanyar dan Gambut, khusus di Kalimantan Selatan. Tenaga kerja atau petani didatangkan dari Pulau Jawa untuk mendukung pengembangan pertanian di wilayah baru tersebut.

Secara runtut, kebijakan pengembangan rawa dapat dipilah secara periodik menurut rencana pemerintah atau penguasa dimulai (1) era pra kemerdekaan tahun 1920–1945, (2) era kabinet Soekarno tahun 1956–1958, (3) era kabinet Soeharto, (4) era kabinet BJ. Habibie, (5) era kabinet Abdurrahman Wahid, dan (5) era kabinet Megawati, (6) era kabinet Susilo Bambang Yudiyono, dan (7) era kabinet Joko Widodo

4.1. ERA PRA KEMERDEKAAN (1920-1945)

Pengembangan rawa dapat diruntut dari abad ke 13 Masehi era Kerajaan Majapahit. Raja Prabu Jaya sebagai keturunan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit pada zamannya dicatat telah mengadakan ekspansi dengan pembukaan lahan rawa untuk pemukiman dan pertanian di daerah aliran Sungai Pawan, Kalimantan Barat. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda yang tercatat dari 1920-an telah melakukan kolonisasi (sekarang disebut dengan transmigrasi) dengan menempatkan orang-orang Jawa di rawa-rawa Kalimantan tepatnya daerah Tamban (1936) dan Serapat serta pembukaan jalan sepanjang 40 km dari Banjarmasin-Martapura, yaitu daerah rawa Aluh-aluh, Kurau, Gambut (1920). Waktu itu orang-orang Jawa dipaksa untuk membuka lahan rawa secara konvensional dan menanaminya dengan tanaman kelapa dan karet. Daerah Tamban dikenal sebagai sentra produksi kelapa di Kalimantan Selatan, sedangkan daerah Serapat, Aluh-aluh, dan Gambut menjadi sentra produksi padi. Daerah Serapat yang dulunya merupakan daerah karet sejak 1920-an mengalami kebakaran hebat (El-Nino) sehingga beralih menjadi sawah yang juga dikenal sebagai sentra produksi padi.

4.2. ERA KABINET SOEKARNO (1956–1958)

Pembukaan rawa pertama secara terencana dan massal di Indonesia digagas oleh Ir. Pangeran Mohammad Noor yang menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1956–1958) yang disebut dengan Proyek *Dredge, Drain, and Reclamation*, yaitu menghubungkan dua sungai besar dengan membangun kanal sehingga akses ke lahan rawa dapat mudah dilakukan. Gagasan ini pada awalnya direncanakan meliputi pembuatan kanal (anjir) antara Banjarmasin-Pontianak (760 km) dan Palembang-Tanjung Balai (850 km). Pemerintah dalam bidang pertanian telah mencanangkan *Rice Project*, yaitu *Rencana Tiga Tahun Produksi Padi* untuk mencapai swasembada pangan 1958. Namun, karena kondisi politik yang kurang menguntungkan, rencana di atas gagal. Rencana pembangunan anjir tidak terlaksana keseluruhan, hanya beberapa anjir (kanal) yang dibangun, antara lain menghubungkan Sungai Barito (Kalimantan Selatan) dengan Kapuas Murung (Kalimantan Tengah), yaitu meliputi Anjir Serapat (28,5 km), Anjir Tamban (25,3 km), dan Anjir Talaran (26 km); antara Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas Murung (Kalimantan Tengah) yaitu Anjir Basarang (24,5 km), Anjir Kelampan (20 km), dan beberapa anjir lainnya di Sumatera dan Kalimantan Barat. Dengan dibangunnya anjir tersebut, daerah rawa berkembang dengan tambahan dibuatnya *handil-handil*, *tatah*, atau parit yang menjorok dari anjir ke pedalaman tegak lurus di kanan kiri sepanjang anjir oleh masyarakat setempat, termasuk juga dibuat sepanjang aliran sungai-sungai maka wilayah rawa memungkinkan untuk dikembangkan lebih luas. Pada era ini, wilayah rawa yang berkembang hanya di sekitar sepanjang anjir menjorok masuk 2–3 km sebatas kemampuan masyarakat membuat handil masuk ke dalam. Namun handil-handil yang dibuat masyarakat sekarang

telah bertambah panjang mencapai 5–10 km masuk dari muara anjir.

Pada masa yang bersamaan, Prof. Dr. Schophuys (1952) mulai merencanakan pembangunan polder di daerah lebak Alabio, pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Negara - Anak Sungai Barito, Kalimantan Selatan seluas 6.500–7.000 hektar dan polder daerah pasang surut Mentaren, tepian Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah seluas 3.000 hektar dan beberapa polder lainnya di Sumatera. Pembangunan polder, khususnya polder Alabio tersebut di atas menghadapi banyak kendala selain fisik juga masyarakat yang menjebol tanggul hingga pada 1972 dilakukan pemberhentian pembiayaan. Kemudian sejak 2010 pembangunan polder Alabio tersebut dilanjutkan lagi dengan perbaikan dan penambahan bangun air dan saluran-saluran serta rumah pompa. Dalam kesempatan panen raya padi di Desa Hambuku Hulu pada 2 Oktober 2015, Menteri Pertanian menyatakan pembangunan Polder Alabio perlu diteruskan yang akan disediakan dana sebesar Rp50 Milyar pada tahun 2016.

4.3. ERA KABINET SOEHARTO (1969–1995)

Kondisi pangan yang sangat memprihatinkan pada dekade 1970 karena pemerintah telah mengimpor beras cukup besar, sekitar 2 juta ton beras sehingga cukup menguras devisa Negara. Oleh karena itu, pemerintah orde baru waktu itu berupaya segera meningkatkan produksi pangannya melalui pembukaan lahan rawa yang direncanakan sekitar 5,25 juta ha untuk sekaligus mendukung program transmigrasi dalam waktu 15 tahun. Disusunlah Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) di bawah koordinasi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dijabat oleh

Prof. Dr. Ir. Sutami untuk pembukaan lahan rawa di Kalimantan dan Sumatera umumnya. Melalui proyek P4S ini telah berhasil dibuka sekitar 1,24 juta hektar lahan rawa yang terdiri atas 29 skim jaringan tata air dengan sistem garpu (UPT) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan 22 skim jaringan tata air dengan sistem sisir (UPT) di Sumatera dan Kalimantan Barat. Beberapa daerah rawa yang telah dibangun di atas telah berkembang menjadi kota-kota kabupaten, kecamatan, bahkan kota provinsi yang menjadi sentra produksi pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan. Tabel 7 menunjukkan luas lahan rawa yang dibuka sepanjang 25 tahun kabinet Soeharto (orde baru: 1970–1994) per tahapan PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Dari luas 900.000 hektar yang dibuka, di antaranya 715.000 hektar berada di lahan rawa pasang surut dan sisanya 185.000 hektar adalah lahan rawa lebak. Pengembangan perluasan lahan rawa untuk pertanian dan transmigrasi di atas berhasil menempatkan penduduk sebanyak 1.717.610 KK dari target sebanyak 2.000.000 KK.

Tabel 7. Luas lahan rawa yang dibuka sepanjang 25 tahun kabinet Presiden Soeharto (orde baru: 1969–1994) per tahapan PELITA

No.	Periode PELITA/ Tahun	Luas Lahan yang Dibuka (ha)	Jumlah Penduduk yang Transmigrasi (KK)	
			Pemerintah	Spontan
1	Pelita I (1969–1973)	59.907	46.286	-
2	Pelita II (1974–1978)	268.997	84.639	-
3	Pelita III (1979–1983)	418.003	364.977	169.497
4	Pelita IV (1984–1989)	98.998	502.221	-
5	Pelita V (1990–1994)	54.088	180.000	370.000
	Total	900.000	1.178.113	539.497

Sumber: Noor (1996)

Masalah pangan kembali menjadi perhatian seiring dengan impor yang cukup besar pada 1995. Impor beras Indonesia meningkat sejak 1990-an, padahal sebelumnya (1985) diakui oleh Badan Pangan Dunia (FAO) berhasil swasembada pangan. Indonesia ingin menjadi “gudang pangan dunia”, maka Presiden Soeharto meminta Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu yang dijabat oleh Dr. Radinal Muchtar dan menteri terkait lainnya untuk menyusun pembukaan sejuta hektar lahan rawa yang dikenal dengan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah dengan terbitnya Keppres No. 82 Tahun 1995 dan Keppres No. 83 Tahun 1995. Namun, Proyek PLG Sejuta Hektar ini dalam perkembangannya dihentikan pada 1999 seiring dengan berakhirnya masa kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto.

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah semakin luasnya lahan *bongkor* atau lahan tidur di daerah rawa yang diperkirakan mencapai 600–800 ribu hektar. Hampir 50% dari lahan yang dibuka pada kawasan PLG Kalimantan Tengah juga terancam menjadi lahan tidur. Sebagian besar jaringan tata air yang telah dibangun pada periode 1970–1995 sudah banyak yang mengalami kemunduran dan kerusakan, termasuk di kawasan PLG yang rusak karena pencurian terhadap besi-besi dan kayu-kayu penyusun bangunan air yang dilakukan masyarakat, sehingga fungsi jaringan tata air dari kawasan PLG di atas belum sepenuhnya operasional. Tabel 8 menunjukkan luas dan peruntukan lahan berdasarkan analisis potensi dan kendala dalam pengembangan PLG Sejuta Hektar yang telah disusun oleh Tim Pokja dan konsultan pemerintah Belanda (Team EMRP, 2008). Kawasan PLG Sejuta Hektar (1,4 juta hektar) dibagi dalam zone pengelolaan air masing-masing untuk konservasi dan budi daya terbatas sebanyak tiga zone (zone I, II, dan III) seluas

1,12 juta hektar dan pengembangan pertanian sebanyak enam zone (zone IV sampai IX) dengan luas 337 ribu hektar (Tabel 8).

Tabel 8. Luas pembagian zone pengelolaan air
Kawasan PLG Sejuta Hektar, Kalteng, 2008

No	Unit Pengelolaan	Luas Areal (ha)
1	Zone I : Konservasi dan Budi daya Terbatas	360.852
2	Zone II : Konservasi dan Budi daya Terbatas	355.457
3	Zone III : Konservasi dan Budi daya Terbatas	408.937
4	Zone IV : Pengembangan Unit Pantai	42.535
5	Zone V : Pengembangan Unit Jenamas	46.227
6	Zone VI : Pengembangan Unit Dadahup	39.316
7	Zone VII: Pengembangan Unit Lamunti	41.565
8	Zone VIII : Pengembangan Unit Palingkau	40.953
9	Zone IX : Pengembangan Unit Kapuas Kuala	126.448
	Total	1.462.296

Sumber: Team MP-EMRP (2008)

Berbeda dengan lahan irigasi, air dapat diatur semauanya, maka di lahan rawa air yang mengatur kita. Oleh karena itu, apabila keliru dalam perkiraan musim, tidak jarang usaha taninya akan mengalami gagal panen. Pengembangan lahan rawa tidak lebih adalah pekerjaan mengatur air sehingga diperlukan pembuatan saluran atau kanal, tanggul, pintu air, tabat, dan sebagainya yang bertujuan agar ketersediaan air untuk tanaman dapat terpenuhi dan sekaligus lahan dapat mempertahankan kelembapan tanahnya. Kekeringan di lahan rawa dapat menurunkan produktivitas lahan akibat berubahnya sifat dan watak tanah setelah deraan kekeringan.

Pembangunan dan pengembangan daerah rawa berjalan seiring dengan komitmen pemerintah. Pengembangan daerah rawa sebagai lumbung pangan masa depan sangat strategis, meskipun barangkali tidak sedikit perbaikan yang diperlukan baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang harus dibenahi dan dikembangkan. Potensi lahan rawa yang maha luas dan sumber daya manusia Indonesia yang cukup besar merupakan modal utama yang sangat memungkinkan, selain kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi yang menjadi pendukung sudah cukup tersedia.

4.4. ERA KABINET B.J. HABIBIE (1997–2000)

Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (*Mega Rice Estate Project*) di Kalimantan Tengah (1995–1999) mengalami banyak hambatan dan dihentikan pada 1999. Presiden B.J. Habibie mendapatkan “tekanan” dari dalam negeri dan dunia internasional untuk melanjutkan Proyek PLG Sejuta hektar di atas. Atas inisiatif negara dibentuklah Tim Pengembangan Lahan Basah yang ditugaskan untuk mengadakan evaluasi terhadap kinerja PLG Sejuta hektar di atas sejak dari awal pembukaan sampai terakhir. Hasil evaluasi tim mengusulkan untuk penghentian Proyek PLG di atas dengan terbitnya Keppres No 80 Tahun 1999. Tim evaluasi memandang lebih banyak dampak negatifnya dari Proyek PLG terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dibandingkan dampak positifnya. Proyek PLG Sejuta Hektar masuk ke dalam penanganan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) DAS Barito, Kahayan dan Kapuas (BAKAKAP). Penghentian Proyek PLG di atas menyisakan “luka” bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan para transmigran yang telanjur ditempatkan di lokasi.

Kawasan PLG sebetulnya mempunyai prospek menjadi kawasan yang maju karena mempunyai keunggulan antara lain (1) terletak antara dua kota yang merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan, yaitu Palangkaraya (ibu Kota Kalimantan Tengah) dan Banjarmasin (ibu Kota Kalimantan Selatan); (2) termasuk wilayah tropika yang mempunyai produksi biomassa sangat besar, keanekaragaman hayati yang tinggi dan keunggulan komparatif lebih tinggi dibandingkan kota lainnya; dan (3) potensi hutan atau kawasan lindung dan konservasi cukup luas, selain kawasan budi daya pertanian yang cukup beragam.

4.5. ERA KABINET KH. ABDURAHMAN WAHID (2001–2002)

Selama kepemimpinan KH. Abdurahman Wahid tidak ada kebijakan untuk rawa secara khusus. Masa kepemimpinannya yang sangat singkat sehingga belum ada kebijakan tentang rawa yang khusus. Padahal impor beras dikenal mengalami puncaknya pada masa kepemimpinan KH. Abdurahman Wahid dengan pangsa impor 5,8 juta ton.

4.6. ERA KABINET MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2002–2004)

Presiden Megawati sempat berkunjung ke kawasan PLG Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah pada 2003 untuk melihat langsung kondisi lahan yang terbenkakai, namun belum sempat memberikan arah dan kebijakan untuk pengembangan lebih jauh.

4.7. ERA KABINET SUSILO BAMBANG YUDOYONO (2004–2014)

Terbitnya Inpres No. 2 Tahun 2007 yang menyatakan adanya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah secara bertahap sejak 2007–2011. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah merencanakan kerjasama dengan pemerintah Australia dan beberapa perusahaan pertanian/perkebunan untuk membuka kembali sekitar 100 ribu hektar lahan PLG di atas menjadi *rice estate*. Melalui Tim Konsultan EMRP (*ex Mega Rice Project*), telah disusun *Master Plan* untuk Rehabilitasi dan Revitalisasi Eks PLG di Kalimantan Tengah pada 2007. Hasil penyidikan dan penelitian Tim EMRP di atas telah dibukukan dalam laporan utama dan beberapa laporan teknis yang berjudul *Master Plan for the Rehabilitation and Revitalisation of Ex Mega Rice Project Area in Central Kalimantan*. Dalam kesempatan penetapan Inpres No 2/2007, presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung untuk panen padi di lahan rawa Dadahup Blok A2, Kabupaten Kapuas (Kalteng) pada 2006. Namun implementasi dari kebijakan Inpres No. 2 Tahun 2007 untuk bidang pertanian mengalami banyak masalah, terkait dengan masalah ganti rugi dan lainnya.

Pada 2010 pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan yang terdiri atas 10 Kementerian dan Lembaga Negara, antara lain Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Nakertrans. PU, LIPI, Bakosurtanal, PPN/Bappenas, dan LAPAN. Telah dilakukan sejumlah diskusi, konsinyasi, dan pengumpulan data sekunder dan primer untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam pemahaman dan penyusunan kerangka kerja kebijakan (*policy framework*). Kegiatan ini didukung dana dari Bank Dunia melalui

Proyek Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive Developmnet in Lowland in Indonesia (WACLIMAD) dan telah menghasilkan beberapa dokumen arahan kebijakan dan strategi pengembangan lahan rawa. Pada 2013 Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) tentang Pengembangan Kawasan PLG untuk pertanian, tetapi sebatas dokumen saja karena tidak ada tindak lanjut dalam bentuk program aksi secara nyata.

4.8. ERA KABINET JOKO WIDODO (2015–2019)

Dalam pemerintahan Joko Widodo, Pembangunan Pertanian di bawah Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MS. sejak awal melancarkan Program atau Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai untuk mencapai swasembada pada 1917 yang disingkat dengan Upsus Pajeli. Pemerintah merencanakan optimalisasi lahan dan mekanisasi pertanian secara luas, termasuk di lahan rawa. Dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan pada 2015 telah dikemukakan tentang rencana pada 2014 (1) rehabilitasi jaringan irigasi tersier 460 ribu hektar, (2) optimalisasi lahan 240 ribu hektar, dan dilanjutkan pada 2015 tentang rencana (1) rehabilitasi jaringan primer dan sekunder 1,45 juta hektar, (2) rehabilitasi jaringan tersier 1,54 juta hektar, (3) optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektar, dan (4) bantuan benih, pupuk, dan alsintan (alat mesin pertanian) antara lain pompa air, traktor, alat tanam, dan alat panen (Kementan, 2014).

Pada kesempatan panen raya di Desa Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua pada 10 Mei 2015 yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan untuk membangun sentra produksi pangan nasional di Merauke. Mulai 2015 sebagai tahap awal dilakukan

pengembangan tanaman padi seluas 270 ribu hektar, kemudian disusul pengembangan tahap dua seluas 285 ribu hektar pada 2016, tahap tiga seluas 250 ribu hektar pada 2017, dan selanjutnya sehingga tersedia lahan seluas 1,0–1,2 juta hektar. Dengan produktivitas 4,0 t GKG (gabah kering giling)/ha dan IP 160, maka dapat diperoleh tambahan produksi 6,5–7,5 juta ton gabah atau 4–5 juta ton beras. Target produksi ini jauh lebih dari cukup untuk swasembada pangan bahkan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai eksportir pangan dunia.

Dinamika perkembangan lahan rawa dan pertanian tidak lepas dari suasana politik dan pemerintahan. Pergantian pemerintahan dan perebutan pengaruh antara partai politik menyebabkan melemahnya hasrat untuk merealisasikan rencana sentra produksi padi di atas, komitmen pemerintah tersandera oleh kekuatan partai yang sangat kental di era pemerintahan selanjutnya (2003–2014). Akibatnya, lahan PLG tinggal cerita dari masa ke masa, rencana untuk membangkitkan kembali lahan PLG ini selalu kandas. Kekhawatiran dari kegagalan PLG di Kalimantan Tengah inilah yang masih membayangi dan merisaukan hati sanubari seiring dengan hasrat untuk menjadikan Merauke sebagai sentra produksi pangan nasional di atas. Belajar dari kegagalan PLG, maka diharapkan Merauke tidak senasib dengan PLG di Kalimantan Tengah di atas.

Lima pilar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan rawa di wilayah baru adalah (1) tentang status lahan, (2) sumber daya manusia, (3) infrastruktur, (4) kelembagaan, dan (5) deregulasi. Status atau kepemilikan lahan ini terkait kuat dengan sistem budaya dan adat yang perlu diperhatikan secara seksama untuk menghindari keterasingan bagi penduduk lokal dan kecemburuan sosial di kemudian hari. Diperlukan model pendekatan yang berbeda dengan umumnya di Jawa atau wilayah lainnya—perlu tata guna lahan spesifik. Sumber daya manusia meliputi jumlah

maupun kualitas sumber daya manusia yang berperan nantinya sebagai tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan. Tenaga kerja yang diperlukan harus mempunyai kemampuan yang andal dalam memanfaatkan teknologi maju yang dianjurkan mau tidak mau penerapan sistem mekanisasi dan penggunaan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi budi daya modern menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi memerlukan tenaga terampil dan kreatif. Misalnya dukungan sistem pengelolaan air diperlukan untuk peningkatan produksi, intensitas pertanaman, dan diversifikasi tanaman. Pada kasus Merauke, ketersediaan air pada musim kemarau merupakan kendala, terutama saat pengolahan tanah dan tanam.

Infrastruktur utama dan pendukung utama terkait dengan prasarana dan sarana usaha tani seperti jalan usaha tani, jalan desa, bangunan air, rumah pompa, pintu air, dan jaringan/saluran irigasi dan drainase, alsintan dari pra panen (traktor) sampai pasca panen, benih, pupuk, dan obat-obatan sebagai sarana produksi. Infrastruktur pendukung adalah prasarana dan sarana publik seperti jalan antardesa/kecamatan, gedung sekolah formal (SD, SMP, SMA, PT) dan informal (kursus, pelatihan); puskesmas/rumah sakit; bengkel alsintan; bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kelembagaan petani maupun pendukung yang dimaksud adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani, kelompok P3A, kelompok pengendalian HPT, kelompok arisan/koperasi/yasinan/adat penting dalam peranannya untuk saling tukar menukar informasi dan memupuk sikap tolong menolong (gotong royong) seperti saat pekerjaan pengolahan tanah, tanam, panen, dan sebagainya. Kelembagaan petani perlu dibangun karena juga berperan untuk menjadi tempat saling diskusi untuk memecahkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelembagaan pendukung yang terkait

produksi dan distribusi antara lain kelembagaan permodalan, penyuluhan, pelatihan, penyimpanan, perawatan, pengemasan, dan pendistribusian serta pemasaran. Adapun regulasi yang terkait dengan pertanian dan khususnya rawa, masih banyak yang perlu dibenahi dalam upaya untuk memberi peluang kepada masyarakat petani agar dapat percepatan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

Dalam rangka memajukan lahan rawa dan mendorong produksi padi nasional, berturut-turut Menteri Pertanian melakukan panen raya pada 10 dan 11 Agustus 2015 di lahan rawa pasang surut, yaitu Desa Karang Buah dan Terusan Mulya. Hasil panen Desa Karang Buah, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel menghasilkan ubinan sebesar 4,5 t GKG/ha untuk varietas Margasari dan 6,7 t GKG/ha untuk varietas Inpara 2, sedangkan di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalteng menghasilkan 7,5 t GKG/ha varietas padi hibrida Sembada. Pada 2 Oktober 2015, di tengah terik kemarau dan kabut asap, Menteri Pertanian melakukan panen raya di lahan rawa lebak, Polder Alabio, Desa Hambuku Hulu, kecamatan Sungai Padang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel dan menghasilkan ubinan 6,48 t GKG/ha varietas Mekongga.